

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Muhamad Sam'un¹

Prodi Agribisnis Universitas Singaperbangsa, Karawang

Ismanudin²

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra, Indramayu

Wiji Febriyani Rizkiyah³

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra, Indramayu

Email:

moh.samun@faperta.unsika.ac.id¹

ismanudin@unwir.ac.id²

wijifebriyani86@gmail.com³

Received : December 30, 2023

Revised : Januari 28, 2024

Accepted : Februari 20, 2024

Available online : Februari 27, 2024

DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.123

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan wilayah pantai dan pesisir di Kabupaten Indramayu telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Kelautan (RIPPK) 2013-2032 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan daerah dan keputusan Bupati Indramayu. Permasalahannya bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya efektif, diantaranya terlihat dari belum optimalnya produksi ikan, peningkatan PAD dari retribusi TPI, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 7 (tujuh) strategi yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Dinas/Badan/Lembaga terkait maupun pihak lainnya dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu. Meskipun demikian diperlukan penajaman untuk menghasilkan strategi implementasi pengelolaan pelabuhan perikanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai kearifan lokal di daerah.

Kata kunci: kebijakan, manajemen, pelabuhan perikanan, wilayah pesisir dan analisis SWOT.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan wilayah pantai dan pesisir di Kabupaten Indramayu telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Kelautan (RIPPK) 2013-2032 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan RIPPK tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua sektor yang terkait, namun kurang dapat berjalan dengan baik. Setiap *stakeholders* memiliki kepentingan masing-masing, sehingga tidak menutup kemungkinan kebijakan suatu sektor kurang sejalan dengan kebijakan sektor lainnya.

Menurut Dahuri (2001) bahwa sebagian besar permasalahan yang bertalian dengan pengelolaan pembangunan wilayah pesisir, seperti pencemaran, *overfishing*, erosi dan sedimentasi pantai, kepunahan jenis, dan konflik penggunaan ruang, merupakan akibat dari terlampau tingginya tekanan lingkungan yang ditimbulkan oleh penduduk beserta segenap kiprah kehidupan dan pembangunannya terhadap lingkungan wilayah pesisir yang memiliki kemampuan terbatas.

Kabupaten Indramayu selain memiliki wilayah darat, juga memiliki wilayah perairan pantai dengan garis pantai sepanjang 147 km dengan melewati 11 kecamatan dan 36 desa (BPS Kabupaten Indramayu, 2019). Berdasarkan hasil penelitan awal diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Indramayu belum efektif. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan pesisir di Kabupaten Indramayu, diantaranya yaitu : (1) Abrasi / erosi pantai dan sedimentasi (tanah timbul); (2) Pencemaran pesisir dan laut seperti limbah industri migas (pencemaran *crude oil* dan industri lainnya); (3) Degradasi (penurunan kuantitas) ekosistem mangrove dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut; (4) Konversi / alih fungsi lahan kawasan lindung mangrove bagi peruntukan lain selain fungsi lindung; (5) *Overfishing* penangkapan perikanan laut di pantai, hal yang menjadi masalah dikarenakan banyaknya penangkapan ikan; (6) Kultur, sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir, kepemilikan lahan dan akses terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut; (7) Ketersediaan air dan penurunan kualitas perairan tambak (frekuensi kegagalan budidaya perikanan tambak); (8) Konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut serta

penegakan hukum dan pentaatan hukum yang masih lemah terhadap peraturan pengelolaan pesisir dan laut; (9) Rob laut dan banjir.

Terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan.; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Sementara itu dalam upaya mendukung pengelolaan usaha perikanan dan kelautan di Indramayu, diantaranya juga telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Di samping terbitnya Keputusan Bupati Indramayu Nomor 523/Kep.24-Diskanla/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu, dan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 523.1.05/Kep.53.A-Diskanla/2013 tentang Penetapan Kawasan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan di Kabupaten Indramayu.

Efektivitas program pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu perlu terus ditingkatkan lagi, hal ini terutama masih terdapat prasarana pelabuhan perikanan yang kurang representatif; sebagian kapal nelayan masih menjual ikan di luar Indramayu; dan upaya peningkatan produksi ikan di TPI dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui sektor perikanan khususnya retribusi dari TPI juga belum sepenuhnya efektif.

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang sangat beragam. Semua sektor usaha perikanan dan kelautan, baik dari budidaya air tawar, budidaya tambak, pengolahan hasil perikanan dan penangkapan ikan di laut memiliki keragaan yang besar dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Indramayu. Tercatat pada tahun 2020, penyerapan tenaga kerja sektor perikanan di Kabupaten Indramayu sebanyak 103.371 jiwa dengan pendapatan bruto per kapita per tahun sebesar Rp. 117.688.576,- Kabupaten Indramayu memiliki 13 (tiga belas) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Ke-13 PPI tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Karangampel, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Cantigi, Kandangahur, Patrol dan Sukra.

Keberhasilan usaha perikanan dan kelautan tersebut sangat ditunjang dengan dukungan infrastruktur yang ada, seperti halnya ketersediaan saluran, jalan, jembatan dan prasarana lain sebagai penunjang kegiatan tersebut. Sektor budidaya memerlukan

pasokan air yang cukup, baik kualitas maupun jumlahnya. Ketersediaan air sebagai media budidaya pada saluran irigasi sangat menunjang dalam keberhasilan usaha budidaya, baik air tawar maupun air payau/ tambak.

Sektor perikanan tangkap membutuhkan kondisi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) maupun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif, baik fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi nelayan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang pola distribusi dan angkutan sangat menunjang dalam seluruh sektor usaha perikanan. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat efisiensi biaya produksi, sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan.

Hal ini diantaranya terlihat dari adanya 5 (lima) TPI yang operasional lelangnya kurang dari 10 bulan; capaian produksinya kurang dari 100% terdapat pada 9 TPI dari 14 TPI; capaian ramannya kurang dari 100% terdapat pada 7 TPI dari 14 TPI terdapat 2 pengelola TPI yang tidak membuat laporan bulanan penyelenggaraan TPI selama 12 bulan. Dari sisi agregat capaian produksinya hanya mencapai 73,66%. Namun dari sisi agregat capaian ramannya adalah 105,88%, sementara efektivitas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI pada tahun 2018 cukup tinggi yaitu Rp. 13.182.581.467,- atau 104,64% dari target sebesar Rp. 12.598.122.000,-.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan harus memenuhi asas *blue economy*, terintegrasi, efisiensi, efektivitas, akselerasi dan memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait yang sudah ada di Kabupaten Indramayu, di antaranya terkait kebijakan tata ruang dan daya dukung wilayah, upaya peningkatan produksi ikan yang dijual/dilelang di TPI dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Selain itu, proses pengembangannya harus bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dengan melakukan inovasi kebijakan, termasuk dalam pembiayaan usaha perikanan dan kelautan dengan membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber pendanaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan dimaksud, diperlukan suatu perencanaan yang baik, pengawasan yang terpadu, dan adanya kajian yang tepat. Dalam rangka membuat suatu perencanaan yang berkesinambungan berbasis wilayah diperlukan adanya sinergitas antara pembangunan yang satu dengan pembangunan yang lainnya dan terintegrasi dengan fasilitas yang ada. Dengan demikian, pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan dan

kelautan di Indramayu, peningkatan kesempatan berusaha dan penyediaan lapangan kerja sektor perikanan dan kelautan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis strategi pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan analisis SWOT yang diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan dinas/badan/lembaga teknis daerah dan yang terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data secara kualitatif.

LANDASAN TEORI

Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki tujuan berdasarkan visi dan misi lembaga yang telah disepakati. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan cara untuk mencapainya yang biasanya disebut strategi yang bersifat makro dari tataran perencanaan sampai hal teknis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya disusun perencanaan (*plan*), kebijakan (*policy*), tahap-tahap pencapaian, organisasi dan personalia yang akan melaksanakannya, dan alokasi anggaran, serta program dan kegiatan aksi.

Dalam sebuah organisasi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal lembaga harus diantisipasi dengan kepekaan lembaga untuk membuat suatu rencana strategis. Perencanaan strategis khususnya, digunakan untuk mempertajam fokus organisasi agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi tersebut. Dalam perencanaan strategis tentu perlu menganalisis tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis dimaksud diantaranya dapat dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*), yakni analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

LAN RI dan BPKP (2001) menjelaskan bahwa perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk keberhasilan implementasi atas perencanaan tersebut dibuat strategi langkah-langkah dan arah kebijakan yang akan ditempuh. Sebagai langkah selanjutnya dibuat program kerja dan kegiatan dengan menggunakan alokasi anggaran untuk mengimplementasikannya. Proses implementasi memerlukan sumberdaya personil, sarana dan prasarana yang digunakan secara tepat agar kinerja implementasi kebijakan memperoleh hasil yang diharapkan.

Visi, misi dan strategi yang jelas diharapkan supaya instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Kajian mengenai potensi, peluang dan kendala merupakan faktor penting guna menentukan langkah dan skala prioritas menentukan strategi arah kebijakan, program kerja dan jenis kegiatan yang tepat. Apabila analisis faktor-faktor tersebut kurang akurat, maka pemilihan langkah-langkah yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang kurang efektif. Perencanaan strategis bersamaan dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.

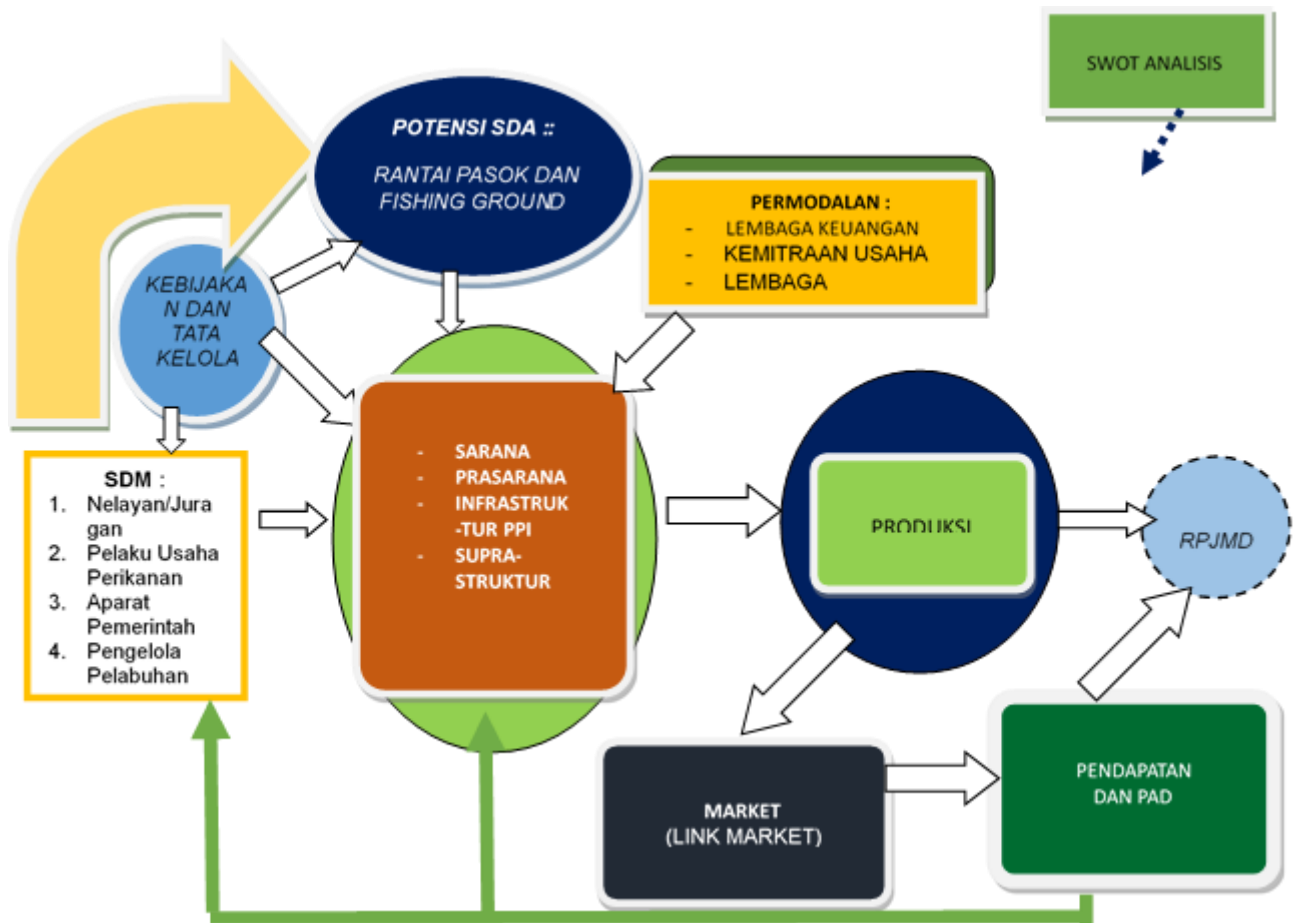
Perencanaan strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis, dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi dan kebijakan instansi pemerintah.

Rangkuti (2014) menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi yang dikembangkan untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Seberapa jauh organisasi pemerintah mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan menekan kelemahannya untuk dapat mengatasi kendala eksternal agar peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pencapaian tujuan dan harapan yang ingin diraih. Ini merupakan konsep utama dari penggunaan analisis SWOT.

Perencanaan strategis disusun guna menentukan pilihan-pilihan langkah yang akan dikerjakan suatu organisasi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan/organisasi pemerintah dapat melihat secara

obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan/organisasi pemerintah dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Analisis strategi pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu berikut ini akan dikaji dengan SWOT analisis. Sebelum menguraikan analisis faktor internal dan faktor eksternal organisasi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu, berikut disajikan terlebih dahulu *road map* pengelolaan Pelabuhan perikanan Kabupaten Indramayu. Road map tersebut disajikan agar memudahkan dalam membaca dan memahami langkah-langkah alur pemikiran upaya yang dilakukan, hingga tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai. Pada Gambar 1 berikut ini adalah menggambarkan road map pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu.



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu (2020)

Gambar 1 : Road Map Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Indramayu

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis terhadap Lingkungan Organisasi

Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dari formula yang dibangun pada analisis SWOT akan muncul beberapa strategi pilihan yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menyusun perencanaan strategis terdapat ruang khusus untuk menganalisis data-data yang terkumpul dari tahap awal (riset). Hasil analisis inilah yang nantinya akan memberikan langkah-langkah menurut skala prioritas bagi pembuat perencana dan akan menjawab “apa yang akan dilakukan nanti ?.” Analisis yang paling sesuai untuk menganalisis keadaan lingkungan internal dan eksternal lembaga/organisasi adalah metode analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk memilih strategi alternatif guna mengadakan perubahan dalam manajemen suatu organisasi (*change management*) secara sistematis. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang dipilih oleh perusahaan atau organisasi. Metode yang digunakan dalam analisis SWOT adalah dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan pada saat bersamaan analisis yang digunakan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan atau organisasi. Lingkungan internal mencakup sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi (SDM, sarana prasarana dan keuangan), kapabilitas, dan kompetensi. Dari lingkungan internal ini akan mendapatkan informasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Sedangkan Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang melingkupi suatu perusahaan atau organisasi. Lingkungan eksternal dapat berupa lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro yaitu lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi organisasi, lingkungan makro yaitu lingkungan yang mempengaruhi namun sulit bagi organisasi untuk mempengaruhinya. Lingkungan eksternal ini menghasilkan peluang dan tantangan bagi perusahaan atau organisasi.

Strategi dalam SWOT meliputi : (a) Strategi SO (Kuadran 1); menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan (*Strength*) yang dimiliki organisasi untuk memanfaatkan peluang (*Opportunity*). Strategi yang harus diterapkan adalah pertumbuhan secara agresif. (b) Strategi ST (Kuadran 2); menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan (*Strength*) yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman (*Threat*), misalnya dengan cara strategi diversifikasi; (c) Strategi WO (Kuadran 3); menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki organisasi untuk memanfaatkan peluang (*Opportunity*), misalnya dengan cara meninjau kembali teknologi dan kebijakan internal yang dipergunakan; dan (d) Strategi WT (Kuadran 4); menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki organisasi dan menghindari ancaman (*Threat*) yang datang dari luar, Dalam hal ini organisasi hanya dapat bertahan untuk menunggu datangnya peluang-peluang baru.

Penggunaan analisis SWOT dalam mewujudkan misi yang dilandasi beberapa konsepsi pemikiran sebagai berikut : (a). Siapa yang mengetahui dan paham betul atas keadaan medan kekuatan yang dimilikinya dan peluang yang dapat dimanfaatkan, serta mengetahui dan paham betul atas kelemahan diri sendiri dan akan adanya ancaman dari luar, maka akan memenangkan perjuangan; (b). Siapa yang dapat memadukan atau menciptakan interaksi antara kekuatan (*strength*) dengan peluang (*Opportunities*), dan meminimalkan kelemahan diri sendiri serta ancaman dari luar, maka akan memiliki keunggulan meraih sukses yang lebih besar.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, metode analisis SWOT digunakan untuk menemukan strategi dan menentukan strategi. Penggunaan analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu belum efektif, sehingga diketahui apa saja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Di samping menganalisis faktor internal juga dilakukan analisis atas faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu. Identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan diperoleh dari hasil pendekatan penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan.

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan penting karena merupakan dasar untuk kegiatan analisis selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan faktor-faktor internal dan eksternal, yang dalam kajian ini melalui *focus group discussion*,

wawancara dan observasi yang selanjutnya dilakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan.

Selanjutnya pada tahap input data, ada 2 (dua) matriks yang akan digunakan, yaitu matriks EFE dan IFE. Informasi dari kedua matriks inilah yang menjadi dasar untuk penyusunan berbagai matriks di tahap pencocokan dan tahap keputusan.

- (1) Kekuatan. Kajian atas kekuatan potensi SDA dan SDM pengelola kawasan PPI Karangsang didasarkan pada kondisi yang dihadapi saat penelitian berlangsung. Data dan informasi sekunder dilengkapi dengan hasil identifikasi lapangan (hasil wawancara, observasi dan FGD) akan digunakan sebagai bahan analisis kekuatan yang dimiliki. Setelah diperoleh informasi mengenai kekuatan, akan ditentukan analisis terhadap kekuatan yang dimiliki kemudian disusun strategi dan saran sebagai masukan bagi pemerintah daerah.
- (2) Kelemahan. Analisis kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Indramayu, baik mencakup SDA maupun SDM pengelola pelabuhan perikanan di Indramayu. Dianalisis rangkaian sebab-akibat terjadinya kelemahan, sehingga kelemahan tersebut dapat ditekan. Kajian ini merupakan kajian atas data dan informasi yang diperoleh dari rangkaian studi tahap sebelumnya, wawancara dan observasi.
- (3) Peluang. Analisis peluang disusun berdasarkan data sekunder, wawancara, observasi dan FGD. Peluang diidentifikasi berdasarkan data dan informasi yang tersedia, di antaranya yang terkait dengan : (a) Potensi sumberdaya alam, (b) Peluang pengembangan dan peluang pasar (lokal, regional, dan internasional), dan (c) Peluang yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan pemerintah.
- (4) Ancaman. Analisis ancaman yang datang dari luar akan dianalisis untuk menentukan strategi dan/atau kebijakan yang perlu ditetapkan untuk mengantisipasi dan/atau mengurangi besarnya ancaman tersebut. Keragaman jenis ancaman yang datang dari berbagai pihak perlu dikenali dan ditentukan langkah-langkah penanggulangannya.

Hasil analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Matrik SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
--	--------------	---------------

ANALISIS FAKTOR INTERNAL	Pelabuhan Perikanan di Indramayu memiliki nilai yang strategis	Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Indramayu belum optimal
	Semangat dan jiwa kemaritiman nelayan Indramayu yang tinggi	Tingkatan dan disparitas kualitas SDM organisasi yang sangat bervariasi dan majemuk
	Kegiatan perikanan tangkap merupakan budaya dan menjadi pilihan usaha andalan masyarakat pesisir Indramayu	Daya Tarik dalam Pengelolaan PPI /TPI dan peran PPNS/ Polsus Pelabuhan masih rendah
	Produk hasil perikanan mampu bersaing	<i>Networking</i> dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan belum terwujud
	Struktur Organisasi pengelola TPI yang berpengalaman	Pelayanan pelelangan lambat (memakan waktu lama)
ANALISS FAKTOR EKSTERNAL		
PELUANG (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
Masih tersedianya stok ikan di luar perairan laut Indramayu yang siap tangkap	Memanfaatkan nilai strategis PP guna mengeksploitasi SDI secara lestari dan berkelanjutan serta pengelolaan kearian budaya lokal	Meningkatkan kapasitas Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan agar dapat memanfaatkan SDI yang tersedia
Pengembangan armada kapal nelayan semakin terbuka	Semangat dan jiwa kemaritiman nelayan Indramayu yang tinggi diarahkan guna memproduksi armada kapal nelayan berukuran lebih besar	Meningkatkan kualitas SDM organisasi untuk dapat melakukan pengembangan armada kapal nelayan
Market produk hasil usaha perikanan tangkap terbuka luas (baik untuk pemenuhan konsumsi ikan bagi masyarakat maupun ekspor)	Mendorong potensi budaya dan pilihan usaha andalan masyarakat pesisir Indramayu dalam memproduksi produk hasil perikanan	Meningkatkan kualitas SDM organisasi agar dapat membuat produk hasil usaha perikanan dan sistem manajemen TPI yang menjadi daya tarik nelayan dan penguatan Peran PPNS/Polsus Pelabuhan
Adanya investor yang turut membangun dan system investasi terbuka	Menggiatkan produksi hasil perikanan guna menarik investor dan perluasan pasar dalam upaya pembangunan perikanan	Membangun <i>networking</i> agar investasi tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan dan pengembangan PP
Dukungan perbankan untuk permodalan usaha perikanan tangkap dari terbuka	Meningkatkan kualitas organisasi pengelola TPI dan nelayan agar mampu mengakses permodalan usaha yang disediakan oleh lembaga perbankan	Meningkatkan kemampuan sistem manajemen pengelolaan TPI untuk mengatasi ambatan dan dapat memanfaatkan lembaga keuangan untuk dukungan permodalan

ANCAMAN (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
Pengaruh kondisi cuaca cukup besar terhadap dinamika aktifitas kapal nelayan	Memanfaatkan dan membuat strategi yang etapt dalam mensiasati kondisi cuaca yang tidak menguntungkan	Meningkatkan kualitas Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan PP agar mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca yang terjadi
Permodalan bakul rendah	Mendorong semangat dan jiwa kemaritiman nelayan Indramayu yang tinggi dan mendorong peningkatan permodalan bakul	Meningkatkan kualitas SDM dan permodalan bakul di TPI
Sedimentasi tinggi pada alur pelayaran kapal nelayan	Mendorong semangat nelayan untuk mengatasi pendangkalan alur	Penyediaan dan pemaanaan sarana secara optimal untuk mengatasi pendangkalan alur
Wilayah pesisir pantai Indramayu sudah padat tangkap, sehingga <i>fishing ground</i> sangat jauh	Meningkatkan kualitas armada dan produk hasil perikanan untuk memanfaatkan potensi SDI yang tersedia	Membangun <i>Networking</i> untuk mengatasi kendala <i>fishing ground</i> yang jauh
Daya dukung sumber daya ikan di perairan laut Indramayu dan kualitas lingkungan menurun	Mendorong unsur-unsur yang terlibat dalam mengelola PP agar menciptakan kelestarian lingkungan dan SDI	Meningkatan manajemen untu mengatasi pelayanan pelelangan lambat (memakan waktu lama)

Penentuan alternatif strategi diformulasikan berdasarkan perpaduan antara kemampuan internal dengan bagaimana cara untuk meraih berbagai peluang dan mengatasi ancaman atau tantangan eksternal. Pada tahap pepadanan dari model kerangka kerja formulasi strategi yang komprehensif bisa dihasilkan *space* yang memadukan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Setiap potensi yang diteliti memiliki peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat dipadupadankan untuk memformulasikan alternatif strategi yang layak (*feasible*).

Selanjutnya menyusun matrik EFI (Evaluasi Faktor Internal) dan EFE (Evaluasi Faktor Eksternal), kemudian menghitung kuadran strategi internal dan eksternal. Tabel 2 berikut adalah Matrik Analisis EFI dan EFE pengelolaan Pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu tahun 2020.

Tabel 2 : Matrik Analisis EFI dan EFE

URAIAN		Bobot (B)	Rating (R)	B x R	Asumsi
I Analisis Lingkungan Internal					
A. Kekuatan					
a	Pelabuhan Perikanan di Indramayu memiliki nilai yang strategis	0,25	4	1,00	Kekuatan utama adalah bahwa Pelabuhan

URAIAN		Bobot (B)	Rating (R)	B x R	Asumsi
b	Semangat dan jiwa kemaritiman nelayan Indramayu yang tinggi	0,23	4	0,90	Perikanan di Indramayu memiliki nilai yang strategis dengan ditunjang nelayan yang berjiwa kemaritiman
c	Kegiatan perikanan tangkap merupakan budaya dan menjadi pilihan usaha andalan masyarakat pesisir Indramayu	0,18	2	0,35	
d	Produk hasil perikanan mampu bersaing	0,18	2	0,35	
e	Struktur Organisasi pengelola TPI yang berpengalaman	0,18	2	0,35	
	Jumlah I-A	1,00		2,95	
B. Kelemahan					
a	Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Indramayu belum optimal	0,15	4	0,0	Kelemahan utama adalah bahwa manajemen pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Indramayu belum optimal
b	Tingkatan dan disparitas kualitas SDM organisasi yang sangat bervariasi dan majemuk	0,13	3	0,39	
c	Daya Tarik dalam Pengelolaan PPI /TPI dan peran PPNS/ Polsus Pelabuhan masih rendah	0,13	3	0,39	
d	<i>Networking</i> dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan belum terwujud	0,12	2	0,24	
e	Pelayanan pelelangan lambat (memakan waktu lama)	0,12	2	0,24	
f	Sebagian nelayan/juragan menjual ikan di luar TPI Karangsong	0,10	2	0,20	
g	Belum ada organisasi pengelola pelabuhan secara khusus	0,10	2	0,20	
h	Sarana dan prasarana PPI belum memadai : daya tampung kawasan kurang (alur, TPI, parkir, kolam labuh, PPD1)	0,08	1	0,08	
i	Pengelolaan TPI dan Perijinan belum efektif	0,08	1	0,08	
	Jumlah I-B	1,00		2,41	
II Analisis Lingkungan Eksternal					
A. Peluang					

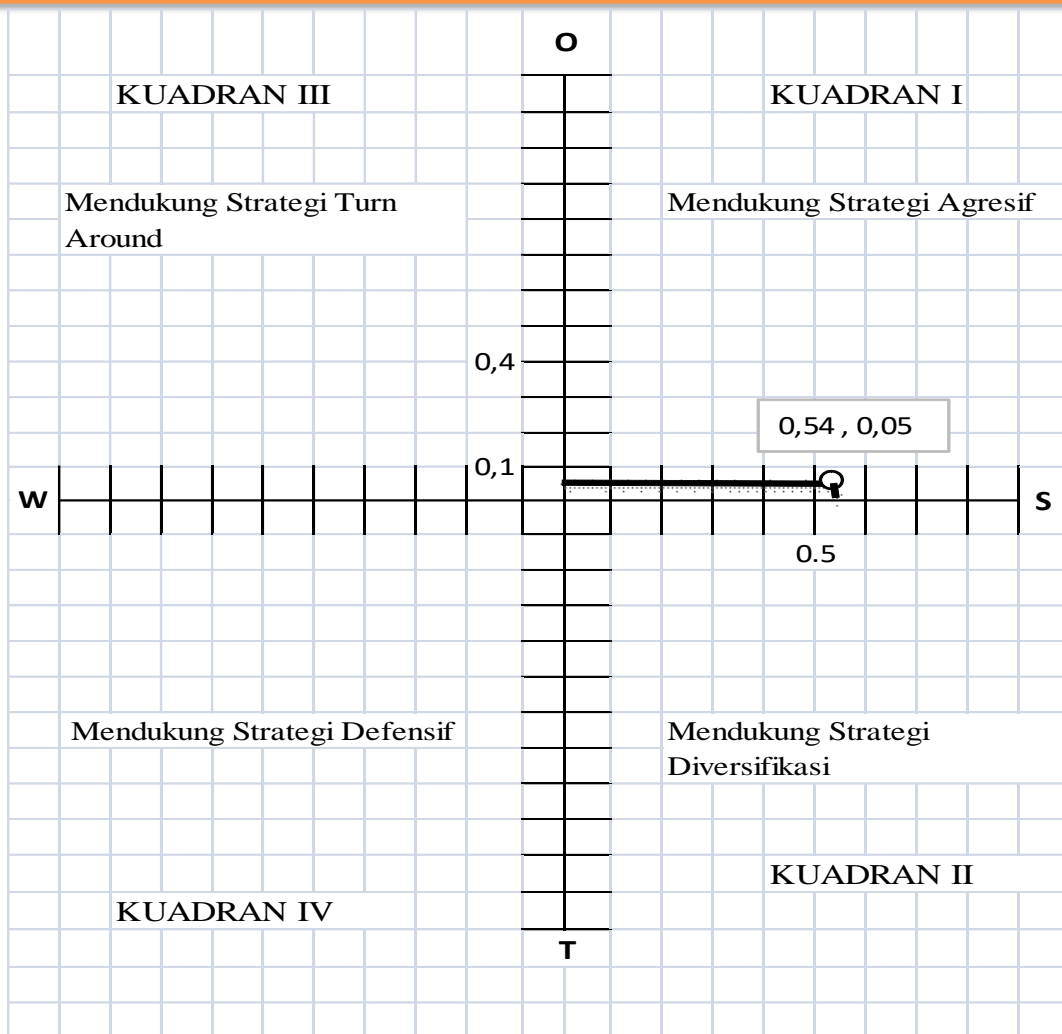
URAIAN			Bobot (B)	Rating (R)	B x R	Asumsi
a	Masih tersedianya stok ikan di luar perairan laut Indramayu yang siap tangkap	0,23	4	0,92	Peluang utama berupa masih tersedianya stok ikan di luar perairan laut Indramayu yang siap tangkap	
b	Pengembangan armada kapal nelayan semakin terbuka	0,21	3	0,63		
c	Market produk hasil usaha perikanan tangkap terbuka luas (baik untuk pemenuhan konsumsi ikan bagi masyarakat maupun ekspor)	0,15	2	0,30		
d	Adanya investor yang turut membangun dan sistem investasi terbuka	0,15	2	0,30		
e	Dukungan perbankan untuk permodalan usaha perikanan tangkap dari terbuka	0,15	2	0,30		
f	Tersedianya teknologi aplikatif penangkapan ikan tersedia dengan baik	0,11	1	0,11		
Jumlah II-A			1,00		2,56	
B. Ancaman						
a	Pengaruh kondisi cuaca cukup besar terhadap dinamika aktifitas kapal nelayan	0,15	4	0,61	Ancaman utama adalah pengaruh kondisi cuaca cukup besar terhadap dinamika aktifitas kapal nelayan dan permodalan bakul rendah	
b	Permodalan bakul rendah	0,13	3	0,39		
c	Sedimentasi tinggi pada alur pelayaran kapal nelayan	0,12	3	0,36		
d	Wilayah pesisir pantai Indramayu sudah padat tangkap, sehingga <i>fishing ground</i> sangat jauh	0,12	3	0,36		
e	Daya dukung sumber daya ikan di perairan laut Indramayu dan kualitas lingkungan menurun	0,11	2	0,22		
f	Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan kurang mendapat dukungan anggaran yang memadai	0,11	2	0,22		
g	TPI luar Indramayu memiliki daya tarik yang lebih tinggi dari TPI di Indramayu	0,10	2	0,20		
h	Dinamika harga ikan yang fluktuatif	0,08	1	0,08		

URAIAN			Bobot (B)	Rating (R)	B x R	Asumsi
I		System birokrasi perijinan SIPI panjang dan memakan biaya tidak murah	0,07	1	0,07	
Jumlah II-B			1,00	-	2,51	

Sumber: Hasil FGD, obserasi dan telaahan dokumen, 2020 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2 : Matriks Hasil Analisis EFI dan EFE memperlihatkan selisih antara faktor kekuatan dan kelemahan (sebagai sumbu X dalam kuadran strategi) yaitu *Strengths (S) - Weakness (S)* = 2,95 - 2,41 = 0,54. Sedangkan selisih antara faktor peluang dan ancaman (sebagai sumbu Y dalam kuadran strategi) yaitu *Opportunities (O) - Threats (T)* = 2,56 - 2,51 = 0,05. Sehingga diperoleh titik kuadran strategi (X,Y) dengan nilai (0,54 , 0,05) yang berarti peta posisi yang mendukung strategi agresif untuk kinerja implmentasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu agar efektif.

Di samping adanya faktor internal berupa kekuatan yang dimiliki oleh sistem pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu, namun dengan melihat analisis faktor eksternal dengan skor sangat kecil, berarti dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu memiliki peluang cukup besar, namun perlu diwaspadai bahwa ancaman dari luar-pun memiliki peran yang cukup besar. Peta strategi pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2: Peta Posisi Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Indramayu.

Oleh karena itu, agar pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu dapat berjalan secara efektif harus diupayakan dengan membuat strategi yang agresif. Strategi ini untuk memadukan faktor-faktor internal dan eksternal dengan cara memaksimalkan potensi kekuatan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada guna mengatasi kelemahan dimiliki dan ancaman dari luar yang terjadi, sehingga pembangunan perikanan dan kelautan berkelanjutan secara lestari dapat dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mulyadi (2009 : 189) menjelaskan bahwa posisi kuadran I yang mendukung strategi agresif merupakan posisi bagus bagi organisasi dan digunakan untuk memanfaatkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi keterbatasan internal dan menghindari atau mengatasi ancaman dari luar. Berikut ini

dikemukakan beberapa strategi yang mencakup strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi WT dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu.

Tabel 3: Matriks Strategi

STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
Memanfaatkan nilai strategis PP guna mengeksploitasi SDI secara lestari dan berkelanjutan serta pengelolaan kearian budaya local	Meningkatkan kapasitas Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan agar dapat memanfaatkan SDI yang tersedia
Semangat dan jiwa kemaritiman nelayan Indramayu yang tinggi diarahkan guna memproduksi armada kapal nelayan berukuran lebih besar	Meningkatkan kualitas SDM organisasi untuk dapat melakukan pengembangan armada kapal nelayan
Mendorong potensi budaya dan pilihan usaha andalan masyarakat pesisir Indramayu dalam memproduksi prooduk hasil perikanan	Meningkatkan kualitas SDM organisasi agar dapat membuat produk hasil usaha perikanan dan sistem manajemen TPI yang menjadi daya tarik nelayan dan penguatan Peran PPNS/Polsus Pelabuhan
Menggiatkan produksi hasil perikanan guna menarik investor dalam upaya pembangunan perikanan	Membangun <i>networking</i> agar investasi tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan dan pengembangan PP
Meningkatkan kualitas organisasi pengelola TPI dan nelayan agar mampu mengakses permodalan usaha yang disediakan oleh lembaga perbankan	Meningkatkan kemampuan sistem manajemen pengelolaan TPI untuk mengatasi hambatan dan dapat memanfaatkan lembaga keuangan untuk dukungan permodalan
STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
Memanfaatkan dan membuat staregi yang tepat dalam mensiasati kondisi cuaca yang tidak menguntungkan	Meningkatkan kualitas Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan PP agar mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca yang terjadi
Mendorong semangat dan jiwa kemaritiman nelayan Indramayu yang tinggi dan mendorong peningkatan permodalan bakul	Meningkatkan kualitas SDM dan permodalan bakul di TPI
Mendorong semangat dan pemberdayaan nelayan untuk mengatasi pendangkalan alur	Penyediaan dan pemaanaan sarana secara optimal untuk mengatasi pendangkalan alur

STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
Meningkatkan kualitas armada dan produk hasil perikanan untuk memanfaatkan potensi sumber daya ikan (SDI) yang tersedia	Membangun <i>Networking</i> untuk mengatasi kendala <i>fishing ground</i> yang jauh
Mendorong unsur-unsur yang terlibat dalam mengelola Pelabuhan Perikanan agar menciptakan kelestarian lingkungan dan SDI	Meningkatkan manajemen untuk mengatasi pelayanan pelelangan lambat (memakan waktu lama)

Dari tabel tersebut, beberapa strategi yang dapat dipilih agar pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu efektif, diantaranya adalah : peningkatan produksi, penetrasi dan pengembangan pasar, pengembangan produk, peningkatan permodalan usaha, meningkatkan inovasi dan kreativitas, menguatkan kapasitas kelembagaan, membangun *network system* dan mentalitas, serta mengkombinasikan berbagai strategi.

2. Strategi Hasil Analisis SWOT

Secara keseluruhan berdasarkan data dan uraian sebelumnya, bahwa strategi yang dipilih dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu agar berjalan efektif sebagai berikut :

Strategi 1:

Pelabuhan perikanan kelas PPI yang ada di Indramayu (PPI Karangsong) merupakan yang terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan perikanan dimana di dalamnya terdapat sarana prasarana pelabuhan, SDM, nelayan/juragan, kapal penangkap ikan beserta alat tangkapnya melakukan eksploitasi penangkapan ikan dengan memperhatikan prinsip kelestarian SDI, sehingga dihasilkan aktivitas yang berkelanjutan. Perlunya penerapan regulasi penggunaan alat tangkap produktif yang ramah lingkungan, ditambah sifat selektif.

Strategi:

Kapasitas SDM nelayan/juragan, kelembagaan KUD Mina/KPL dan pengelola TPI didorong agar memproduksi kapal penangkap ikan berukuran lebih besar (saat ini kapal terbesar berukuran 146 GT) agar dapat menjangkau perairan laut yang lebih luas. Peningkatan kapasitas SDM (contoh bintek keahlian SKK, managerial pengelolaan TPI) dan peningkatan ukuran armada kapal nelayan bertujuan guna meningkatkan produksi ikan asil tangkapan dan meningkatkan pendapatan nelayan. Aktifitas manajemen

organisasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kapasitas manajemen kelembagaan setidaknya menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti POAC atau POSDiCoRB, sebagaimana dijelaskan oleh : (a) George R. Terry (POAC) : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengendalian) dan (b) Luther M. Gullick (POSDiCoRB) : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pengarahan), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pembuatan laporan) dan *Budgeting* (Panganggaran).

Strategi 3:

Membangun *networking* agar investasi tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan secara optimal, dan menetapkan serta menjalankan program kerja yang tepat. Beberapa indikator yang termasuk dalam bagian dari *networking* adalah komunikasi, koordinasi, kolaborasi, ikatan-ikatan dalam bentuk MoU dan atau perjanjian kerja sama, komitmen, konsisten. Dimensi-dimensi tersebut menghasilkan jalinan ikatan yang kuat sehingga setiap unsur yang terlibat memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Pemberian reward dan punishment menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan *networking* yang efektif. Rencana dan program kerja yang telah disusun bersama antar lintas organisasi atau lembaga menjadi ikatan kuat untuk diimplementasikan secara nyata. Dalam membangun *networking* dibutuhkan *leadership* yang kuat dan mumpuni, sehingga bisa mengarahkan dan menggerakkan bawahannya dan menjalin kerja sama dengan mitranya.

Strategi 4:

Meningkatkan kualitas SDM termasuk PPNS/Polsus Pelabuhan dan permodalan bakul di TPI. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, penyuluhan, sekolah formal dan informal/lapang. Baik SDM aparatur maupun SDM KUD Mina/KPL, nelayan, juragan, bakul harus mendapatkan peningkatan pengetahuan sehingga akan berpengaruh positif terhadap sikap, keterampilan dan perilakunya. Pembangunan kapasitas SDM ini menjadi kunci dasar implementasi pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Indramayu. Pemerintah hendaknya membuka akses kepada bakul agar dapat meningkatkan permodalannya. Pemerintah memfasilitasi akses bakul untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan. Meningkatkan secara aktif peran serta PPNS/Polsus pelabuhan perikanan.

Strategi 5:

Meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dan swasta, penguatan kelembagaan dan melakukan revolusi mental semua implementor. Penguatan kelembagaan mutlak dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kapasitas SDM yang ada dalam kelembagaan tersebut. Penguatan kelembagaan juga bisa dilakukan dengan implementasi atas peraturan perundang yang sudah ada atau membuat peraturan perundangan baru terkait pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan, seperti contoh dibentuknya lembaga khusus pengelola pelabuhan perikanan di Indramayu. Pembuatan dan implementasi SOP tata kerja organisasi yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan. Pemberian insentif dan dis-insentif atas kinerja kelembagaan yang telah ada. Pengenaan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Strategi 6:

Melakukan pembinaan dan pemberdayaan baik terhadap aparatur sebagai implementor maupun terhadap masyarakat sebagai agen pemerintah dan sebagai *target group* dari implementasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan. Upaya pemberdayaan itu berarti memberikan kepada masyarakat peluang untuk melibatkan diri dengan hal-hal yang menyangkut paham, bakat, kekuatan dan kesenangan masyarakat. Pemberdayaan hendaknya dipahami sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepada mereka kepercayaan untuk mengelola program-program tertentu atas keputusannya sendiri.

Diharapkan, dengan meningkatnya kemampuan masyarakat baik secara intelektual dan fisik, maka masyarakat akan memberikan kontribusi secara maksimal terhadap implementasi pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan. Kemampuan intelektual hanya akan dapat di capai apabila Pemerintah secara serius memperhatikan masalah pendidikan, baik pendidikan formal, informal dan non formal. Selanjutnya peningkatan kemampuan secara fisik hanya akan dapat di capai apabila Pemerintah secara serius memperhatikan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungannya. Dimensi kemampuan masyarakat bertalian erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Strategi 7:

Menghadirkan investor, penguatan permodalan usaha dan membuka terobosan perluasan peluang pasar bagi produk hasil-hasil perikanan tangkap. *Networking* juga

dibutuhkan dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang sehat, berdaya saing dan menraik, akses penguatan permodalan terbuka lebar, hadirnya lembaga-lembaga ekonomi dan permodalan dalam rangka memberikan kemudahan pelaku usaha ekonomi lemah untuk meningkatkan modal usahanya. Dan yang sangat penting lagi terciptanya *linkage market* produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang berusaha di kawasan pengelolaan pelabuhan perikanan. Kepastian pasar harus diciptakan dan peluang pasar harus dikejar dan diterobos agar tercipta iklim usaha yang kondusif, sehingga masyarakat nelayan memiliki pendapatan yang layak dan terus meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian secara keseluruhan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa strategi pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta *stakeholders* maupun para pengelola pelabuhan perikanan agar berjalan efektif, yaitu : (a) Memanfaatkan nilai strategis pelabuhan perikanan guna mengeksplorasi sumber daya ikan (SDI) secara lestari, dan berkelanjutan, serta pengelolaan kearifan budaya lokal; (b) Meningkatkan kapasitas manajemen dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan agar dapat memanfaatkan SDI yang tersedia dengan melakukan pengembangan armada kapal nelayan serta meningkatkan daya tarik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi nelayan; (c) Membangun *networking* agar investasi tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan secara optimal, dan menetapkan serta menjalankan program kerja yang tepat; (d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk PPNS/Polsus Pelabuhan dan permodalan bakul di TPI; (e) Meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dan swasta, penguatan kelembagaan dan melakukan revolusi mental semua implementor kebijakan; (f) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan, baik terhadap aparatur sebagai implementor maupun terhadap masyarakat sebagai agen pemerintah dan sebagai *target groups* dari implementasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan; (g) Menghadirkan investor, penguatan permodalan usaha dan membuka terobosan perluasan peluang pasar bagi produk hasil-hasil perikanan tangkap.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, (2019). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka*.
Dahuri, R. (2001). *Indonesia Poros Maritim Dunia Pilihan Kebijakan Sangat Tepat*.
Universitas Sebelas Maret: Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia

LAN dan BPKP, (2001). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI).

Rangkuti, Freddy. (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 523/Kep.24-Diskanla/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 523.1.05/Kep.53.A-Diskanla/2013 tentang Penetapan Kawasan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan di Kabupaten Indramayu.